

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Kerawanan Banjir Kawasan Perumahan Formal Kota Tanjungpinang menghasilkan tiga kelas tingkatan kerawanan, yakni kerawanan banjir rendah terdapat pada 15 perumahan pada sebagian wilayahnya meski tidak secara keseluruhan, tingkat kerawanan banjir sedang terdapat pada seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 179 perumahan, dan tingkat kerawanan banjir tinggi terdapat pada 22 perumahan pada sebagian wilayahnya meski tidak secara keseluruhan. Sedangkan Tingkat Kerawanan Banjir Kawasan Perumahan Swadaya Kota Tanjungpinang menghasilkan dua kelas tingkatan kerawanan, yakni kerawanan banjir sedang dengan luas 2.353,34 Ha atau 94,16% dari total luas perumahan swadaya, dan tingkat kerawanan banjir tinggi dengan luas 133,95 Ha atau 5,38% dari total luas perumahan swadaya.
2. Tingkat Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Perumahan Formal yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi menghasilkan 9 perumahan memiliki tingkat kesesuaian pola ruang sangat sesuai, 3 perumahan memiliki tingkat kesesuaian pola ruang cukup sesuai, dan 10 perumahan lainnya memiliki tingkat kesesuaian pola ruang yang tidak sesuai.
3. Tingkat Kerawanan Banjir Pola Ruang Kawasan Perumahan Formal RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2041 menghasilkan tiga kelas tingkatan kerawanan, yakni kerawanan banjir rendah dengan luas 2,96 Ha atau 0,57% dari total luas pola ruang kawasan perumahan formal, kerawanan banjir sedang dengan luas 488,64 Ha atau 95,18% dari total luas pola ruang kawasan perumahan formal, dan kerawanan banjir tinggi dengan luas 21,74

Ha atau 4,25% dari total luas pola ruang kawasan perumahan formal. Sedangkan Tingkat Kerawanan Banjir Pola Ruang Kawasan Perumahan Swadaya RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2041 menghasilkan tiga kelas tingkatan kerawanan, yakni kerawanan banjir rendah dengan luas 290,75 Ha atau 4,67% dari total luas pola ruang kawasan perumahan swadaya, kerawanan banjir sedang dengan luas 5.191,40 Ha atau 83,52% dari total luas pola ruang kawasan perumahan swadaya, dan kerawanan banjir tinggi dengan luas 733,53 Ha atau 11,81% dari total luas pola ruang kawasan perumahan swadaya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat memperhatikan sistem saluran pembuangan, memperbanyak kawasan hijau dan daerah serapan di Kota Tanjungpinang guna menanggulangi bencana banjir terutama di kawasan perumahan.
2. Melihat perkembangan kawasan perumahan di Kota Tanjungpinang yang terus meningkat dan sebagian besar berada di kawasan rawan bencana, pemerintah hendaknya segera membuat kebijakan tentang pembangunan kawasan perumahan di lokasi rawan bencana.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan atau implementasi kewajiban kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pengendali pemanfaatan lahan serta kewajiban masyarakat Kota Tanjungpinang dalam mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum membangun bangunan/tempat tinggal.
4. Kepada masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam memelihara lingkungan dengan tujuan mencegah terjadinya genangan pada permukaan.

5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dari rencana pola ruang kawasan perumahan yang memiliki kerawanan banjir tinggi dan mengganti pola ruang tersebut menjadi kawasan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappelitbang Kota Tanjungpinang. 2021. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2041*. Kota Tanjungpinang : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2011. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta : BNPB
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Kota Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2022*. Kota Tanjungpinang : Badan Pusat Statistik
- Darmawan, Kurnia, Hani'ah, dan Andri Suprayogi. 2017. *Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampang Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Dibiyosaputro, Suprpto. 1984. *Flood Susceptibility And Hazard Survey of The Kudus Prawata Welahan Area, Central Java. Indonesia*. Thesis, ITC, Enschede, Netherlands.
- Hermon, Dedi. 2012. *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi*. Padang : UNP Press
- Irwansyah, Edi. 2013. *Sistem Infomasi Geografis : Prinsip Dasar Dan Pengembangan Aplikasi*. Yogyakarta: Digibooks.
- Fernandito dan Haryani. 2019. *Kajian Daya Dukung Permukiman Berdasarkan Faktor Kebencanaan Di Kecamatan Pariaman Tengah*. Padang : ACE Conference
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana*. Jakarta : Pusat Krisis Kesehatan
- Kusumo dan Nursari. 2016. *Zonasi Tingkat Kerawanan Banjir Dengan Sistem Informasi Geografis Pada DAS Ciduran, Kabupaten Serang, Banten*. Jurnal String Volume 1 No 1

Kuswartojo, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia : Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan*. Bandung : Penerbit ITB.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pratama, Dio Putra. 2018. *Arahan Penataan Ruang Pemukiman Berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Padang : Universitas Bung Hatta.

Putra, Muh. Alief Rusli. 2017. *Pemetaan Kawasan Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Menentukan Titik Dan Rute Evakuasi*. Makassar : Universitas Hasanuddin

Santoso, Arif. 2015. *Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berdasarkan Aspek Geografis Dan Aspek Lingkungan Di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang